



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PERINGATAN HARI PERHUBUNGAN NASIONAL: TANTANGAN SEKTOR TRANSPORTASI

Rafika Sari

Analisis Legislatif Ahli Madya
rafika.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peringatan Hari Bakti Perhubungan (Harhubnas) pada tanggal 17 September 2025, dengan tema “Bakti Transportasi untuk Negeri” menyoroti semangat pengabdian insan transportasi dalam pembangunan infrastruktur. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa transportasi bukan hanya sekedar infrastruktur, melainkan “jalan kehidupan” yang menghubungkan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Rote. Dalam mewujudkannya ada beberapa tantangan yang dihadapi yaitu dinamika geopolitik global yang menuntut untuk segera memperkuat kemandirian logistik nasional. Kemudian, tantangan pengelolaan anggaran juga menuntut adanya efisiensi dan inovasi dalam mewujudkan kebutuhan publik atas layanan transportasi publik. Meskipun visi transportasi menekankan peran strategisnya sebagai “jalan kehidupan”, namun sektor transportasi menghadapi tantangan utama berupa terpinggirkannya transportasi publik di perkotaan yang menyebabkan ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

Berikut potret angkutan umum di Indonesia. *Pertama*, jumlah angkutan umum yang menurun bahkan nyaris hilang. *Kedua*, armada tua atau bahkan tidak layak jalan. *Ketiga*, jumlah penggunaan transportasi relatif rendah. Di Jakarta, pengguna angkutan umum belum mencapai seperlima perjalanan harian, maka di kota-kota lain yang infrastrukturnya jauh lebih terbatas, kondisinya hampir pasti lebih rendah lagi. Di Semarang, layanan Bus Rapid Transit (BRT) yang beroperasi sejak 2009 belum mampu menarik minat besar, jumlah penumpangnya masih relatif kecil dibanding kebutuhan mobilitas harian. Di Palembang, Light Rail Transit (LRT) yang dibangun untuk Asian Games 2018 hanya mengangkut belasan ribu penumpang per hari, jauh dari kapasitas yang tersedia. Di Makassar, operasional BRT Trans Mamminasata tidak stabil. Sebagian koridor sempat terhenti karena subsidi pusat dihentikan, dan kini hanya bertahan terbatas berkat dukungan subsidi dari program Bus Trans Sulsel yang dijalankan pemerintah provinsi. Denpasar, yang dikenal sebagai kota wisata dunia, pada 2007 hanya mencatat tingkat penggunaan angkutan umum sekitar 3–4%. Kondisi ini menggambarkan betapa sulitnya menjadikan transportasi publik sebagai tulang punggung mobilitas.

Paket Ekonomi 2025 yang diluncurkan 15 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, menargetkan efisiensi transportasi sebagai kunci keberhasilan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja melalui program padat karya tunai (*cash for work*) dengan total anggaran Rp5,3 triliun dari Kementerian Perhubungan (Rp1,8 triliun) dan Pekerjaan Umum (Rp3,5 triliun). Anggaran ini akan membiayai upah harian bagi 609.465 orang selama September hingga Desember 2025. Skema ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung berupa upah harian yang mendukung daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Menhub, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa tanpa sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkeadilan, agenda percepatan pertumbuhan ekonomi nasional akan sulit tercapai. Peran transportasi dalam misi Asta Cita Presiden Prabowo sangat strategis dan vital, karena berfungsi sebagai penghubung dan penopang utama dalam mewujudkan delapan program prioritas pemerintahan. Secara umum, transportasi berperan dalam mendukung

pemerataan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan di bidang transportasi, solusi mendasar meliputi optimalisasi tata kelola transportasi melalui kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, revitalisasi angkutan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, serta integrasi kebijakan tata ruang dan transportasi. Pendekatan ini memastikan transportasi publik lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta rencana pembangunan wilayah. Di sisi pembiayaan, penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dengan melibatkan sektor swasta dan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan melalui KPBU pada sektor transportasi menjadi solusi utama untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2025 sebesar Rp50,6 triliun seperti yang disampaikan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Atensi DPR

Pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi melalui darat, udara, dan laut merupakan strategi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan Paket Ekonomi 2025 yang diusung Pemerintah. Komisi V DPR RI dapat memberikan perhatian terhadap evaluasi kinerja pemerintah dalam sektor transportasi dan memberikan perhatian khusus dalam perbaikan pelayanan publik. Komisi V DPR RI dapat mendorong pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah transportasi publik dengan melibatkan swasta melalui skema KPBU. Hal ini dilakukan untuk menjawab keterbatasan anggaran daerah untuk mendanai layanan transportasi publik akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah tahun ini. DPR RI melalui Komisi V dapat mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun 2025 dan memastikan bahwa anggaran untuk program padat karya tunai dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui Paket Ekonomi 2025.

Sumber

antaranews.com, 16 September 2025;
dephub.go.id, 17 September 2025;
detik.com, 16 September 2025;

kompas.com, 17 September 2025;
rri.co.id, 18 September 2025; dan
Suara Merdeka, 16 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*